



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 114 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN CILAWU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 89 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 89 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 89 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 89);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CILAWU TAHUN 2023.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 89 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 89) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 114

---

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 114 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 89  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA  
KERJA KECAMATAN CILAWU  
TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang.**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang

---

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun

Kecamatan Cilawu sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Cilawu telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tema Pembangunan Tahun 2023 berdasarkan RKPD Tahun 2023 yaitu “ **Percepatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat**”.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan

---

demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa



- 
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan<sup>1</sup> dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Cilawu tahun 2023.

### **1.1 Landasan Hukum**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

---

<sup>1</sup>

---

Lembaran Negara Republik Indonesia  
2851);

Nomor

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepoisme (( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

---

*Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 
- 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

- 
- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah

- 
- diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

- 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
  32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
  33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cilawu tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Cilawu guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan



---

kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cilawu tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Cilawu;
3. Menjadi acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cilawu Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renjaprovinci/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

---

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Perkiraan Capaian Tahun Berjalan Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahunn-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Cilawu sudah disahkan.

#### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi

---

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB. III .Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah

---

kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar keberbagai Kawasan dan apa saja yang terfokus pada Kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

## **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

---

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tandatangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **LAMPIRAN**

---

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN**  
**BERJALAN**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Cilawu. Tercapainya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cilawu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cilawu selama tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cilawu Tahun 2023 antara lain :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.8.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.8.2. Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.8.3. Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- 
- 1.8.4. Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 1.8.5. Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 1.8.6. Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan  
ikhtiar Realisasi kinerja SKPD
  - 1.8.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
      - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
      - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
      - 2.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - 2.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - 2.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - 2.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
      - 2.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - 2.5.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
      - 2.5.7 Penatausahaan Arsip Dinamis
  - 2.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
      - 2.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      - 2.6.2 Pengadaan Mebel
      - 2.6.3 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya



- 
- 2.6.4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 2.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
      - 2.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - 2.7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 2.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
      - 2.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      - 2.8.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
      - 1.1.1 Kordinasi Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
        - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
    - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
      - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

---

2.2.2 Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan pelayanan kepada

masyarakat di wilayah Kecamatan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Penyelenggaraan Lemabaga Kemasyarakatan

3.1.2 Peningkatan Kapasitas Lemabaga Kemasyarakatan

3.3 Kordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM)

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Pencegahan copid-19 di Tingkat Desa

3.1.2 Penanganan copid-19 di Tingkat Desa

3.1.3 Pembinaan Penanganan copid-19 di Tingkat Desa

### **4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

### **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

---

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

1.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

1.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

1.1.4 Fasilitasi Penyusunan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari Target Rp 3.278.000,- Realisasi Rp 3.278.000,- (100 %)
2. Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Target Rp1.149.200,- Realisasi Rp 1.1149.200,- (100 %)

3. Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Target Rp 1.004.600,- Realisasi Rp 1.004.600,- ( 100 % )
4. Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Target Rp1.282.000,- Realisasi Rp 1.282.000,- ( 100 % )
5. Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Target Rp1.345.600,- Realisasi Rp 0,- ( 0 % )
6. Kordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Target Rp 1.140.000,- Realisasi Rp 1.140.000,- ( 100 % )
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target Rp 1.680.000,- Realisasi Rp 1.680.000,- ( 100 % )
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Target Rp1.865.855.943,- Realisasi Rp 699.726.722,- (37.50% )
9. Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Target Rp 4.047.400,- Realisasi Rp 0,-( 0 %)
10. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Target Rp 21.222.000,- Realisasi Rp 5.464.000,- ( 25.75 % )
11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Target Rp 15.000.000,- Realisasi Rp 0,- ( 0 %)
12. Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor Target Rp 4.807.400,- Realisasi Rp 4.087.400,- ( 100 %)
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target Rp 33.420.200,- Realisasi Rp 15.211.800,- ( 45.52 % )
14. Penyediaan peralatan rumah tangga Target Rp 53.957.250,- Realisasi Rp 8.400.350,- ( 15.57 % )

- 
15. Penyediaan barang cetakan Target Rp 11.641.800,- Realisasi Rp 6.611.300,-( 56.79 % )
  16. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Target Rp 11.649.400,- Realisasi Rp 4.741.000( 40.70 % )
  17. Fasilitasi kunjungan tamu Target Rp 12.978.000,- Realisasi Rp 5.407.500( 41.67 % )
  18. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Target Rp 10.234.000,- Realisasi Rp 9.995.000( 97.66 % )
  19. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Target Rp 16.666.560,- Realisasi Rp 6.892.19,- ( 41.35 % )
  20. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Target Rp 23.667.600,- Realisasi Rp 14.680.600,-( 62.03 % )
  21. Penyediaan jasa pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan Target Rp 27.052.000,- Realisasi Rp 14.535.100( 53.73 % )
  22. Penyedia jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Target Rp 61.903.200,- Realisasi Rp 32.303.200,- ( 52.18 % )
  23. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Target Rp 130.920.300,- Realisasi Rp 25.905.200,- ( 19.79 % )
  24. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Target Rp 186.000.000,- Realisasi Rp 57.250.000,- ( 30.78 % )
  25. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Target Rp 3.254.400,- Realisasi Rp 3.254.400,- ( 100 % )

- 
26. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan Target Rp 15.000.000,- Realisasi Rp 6.640.000,- ( 44.27 % )
  27. Meningkatkan pasilitas Lembaga kemasyarakatan Target Rp 15.000.000,- Realisasi Rp 7.500.100,- ( 50 % )
  28. Penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan Target Rp 16.560.000,- Realisasi Rp 6.679.100,- ( 40.33 % )
  29. Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Target Rp 70.769.100,- Realisasi Rp 30.654.700,- ( 43.32 % )
  30. Hormonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Target Rp 48.950.000,- Realisasi Rp 9.696.000,- ( 19.81 % )
  31. Pelaksanaan tugas forum koordinasi di kecamatan Target Rp 200.000.100,- Realisasi Rp 82.185.000,- ( 41.09 % )
  32. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Target Rp 7.255.000,- Realisasi Rp 5.324.500,- ( 73.39 % )
  33. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa Target Rp 7.974.100,- Realisasi Rp 7.974.100,- ( 100 % )

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang**  
**Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2023 TRIWULAN II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Programs Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.184.982.153</b>	<b>838.309.964</b>	<b>38.37</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.278.000	3.278.000	100
2	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.149.200	1.149.200	100
3	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.004.600	1.004.600	100
4	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.282.000	1.282.000	100
5	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.345.600	0	0
6	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1.140.000	1.140.000	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.680.000	1.680.000	100
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.865.855.943	699.726.722	37.50
9	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.047.400	0	0
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.222.000	5.464.000	25.75
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	0	0
12	Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	4.807.400	4.807.400	100
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.420.200	15.211.800	45.52
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	53.957.250	8.400.350	15.57
15	Penyediaan barang cetakan	11.641.800	6.611.300	56.79
16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	11.649.400	4.741.000	40.70
17	Fasilitasi kunjungan tamu	12.978.000	5.407.500	41.67

18	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	10.234.000	9.995.000	97,66
19	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	16.666.560	6.892.192	41,35
20	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	23.667.600	14.680.600	62,03
21	Penyediaan jasa pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	27.052.000	14.535.100	53,73
22	Penyedia jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	61.903.200	32.303.200	52,18
<b>2</b>	<b>Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>316.920.300</b>	<b>83.155.200</b>	<b>26,24</b>
23	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	130.920.300	25.905.200	19,79
24	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	186.000.000	57.250.000	30,78
<b>3</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>49.814.600</b>	<b>24.073.600</b>	<b>48,33</b>
25	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	3.254.400	3.254.400	100,00
26	Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan	15.000.000	6.640.000	44,27
27	Meningkatkan pasilitas Lembaga kemasyarakatan	15.000.200	7.500.100	50,00
28	Penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	16.560.000	6.679.100	40,33
<b>4</b>	<b>Program koordinasi ketentraman dan keterbitan umum</b>	<b>119.719.100</b>	<b>40.350.700</b>	<b>33,70</b>
29	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	70.769.100	30.654.700	43,32



30	Hormonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	48.950.000	9.696.000	19,81
<b>5</b>	<b>Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>200.000.100</b>	<b>82.185.000</b>	<b>41,09</b>
31	Pelaksanaan tugas forum koordinasi di kecamatan	200.000.100	82.185.000	41,09
<b>6</b>	<b>Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>15.229.100</b>	<b>13.298.600</b>	<b>87,32</b>
32	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	7.255.000	5.324.500	73,39
33	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	7.974.100	7.974.100	100,00

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu dalam pelaksanaan Renja 2023 dari 33 Sub Kegiatan terdapat 9 ( Sembilan ) Sub Kegiatan (37,46%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan ( 100 % )
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD ( 100 % )
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD ( 100 % )
4. Kordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD ( 100 % )
5. Kordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD ( 100 % )
6. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah ( 100 % )
7. Penatausahaan Arsip dinamis DKPD ( 97.66 % )
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dan Forum musyawarah  
Perencanaan Pembangunan di Desa ( 100 % )
9. Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ( 100 % )

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi**  
**Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2023 TRIWULAN II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.184.982.153</b>	<b>838.309.964</b>	<b>38.37</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.278.000	3.278.000	100
2	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.149.200	1.149.200	100
3	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.004.600	1.004.600	100
4	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.282.000	1.282.000	100
6	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1.140.000	1.140.000	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.680.000	1.680.000	100
18	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	10.234.000	9.995.000	97.66
<b>3</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>49.814.600</b>	<b>24.073.600</b>	<b>48,33</b>
1	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	3.254.400	3.254.400	100,00
<b>6</b>	<b>Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>15.229.100</b>	<b>13.298.600</b>	<b>87,32</b>
1	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	7.974.100	7.974.100	100,00

*Sumber : Pengolahan data dan LRA*

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2023, belum ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu.

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Belum Memenuhi**  
**Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2023 TRIWULAN.II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Programs Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.184.982.153</b>	<b>838.309.964</b>	<b>38.37</b>
1	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.345.600	0	0
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.865.855.943	699.726.722	37.50
3	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.047.400	0	0
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.222.000	5.464.000	25.75
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	0	0
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.420.200	15.211.800	45.52
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	53.957.250	8.400.350	15.57
8	Penyediaan barang cetakan	11.641.800	6.611.300	56.79
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	11.649.400	4.741.000	40.70
10	Fasilitas kunjungan tamu	12.978.000	5.407.500	41.67
11	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	16.666.560	6.892.192	41,35
12	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	23.667.600	14.680.600	62,03
13	Penyediaan jasa pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	27.052.000	14.535.100	53,73
14	Penyedia jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	61.903.200	32.303.200	52,18

<b>2</b>	<b>Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>316.920.300</b>	<b>83.155.200</b>	<b>26,24</b>
1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	130.920.300	25.905.200	19,79
2	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	186.000.000	57.250.000	30,78
<b>3</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>49.814.600</b>	<b>24.073.600</b>	<b>48,33</b>
1	Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan	15.000.000	6.640.000	44,27
2	Meningkatkan pasilitas Lembaga kemasyarakatan	15.000.200	7.500.100	50,00
3	Penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	16.560.000	6.679.100	40,33
<b>4</b>	<b>Program koordinasi ketentraman dan keterbitan umum</b>	<b>119.719.100</b>	<b>40.350.700</b>	<b>33,70</b>
1	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	70.769.100	30.654.700	43,32
2	Hormonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	48.950.000	9.696.000	19,81
<b>5</b>	<b>Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>200.000.100</b>	<b>82.185.000</b>	<b>41,09</b>
1	Pelaksanaan tugas forum koordinasi di kecamatan	200.000.100	82.185.000	41,09
<b>6</b>	<b>Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>15.229.100</b>	<b>13.298.600</b>	<b>87,32</b>
1	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	7.255.000	5.324.500	73,39

Sumber : Pengolahan data dan LRA

- 4) Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan  
Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan,

---

antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari targetcapaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cilawu pada umumnya.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu berdampak pada laporan kinerja realisas ikeuangan Kecamatan Cilawu.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.

- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan

### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Cilawu merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Cilawu selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Cilawu tahun lalu (tahun 2020) seperti terlihat pada tabel berikut ini:





**Tabel 2.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cilawu**  
**Kabupaten Garut Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)	Ket	
		c	D								e
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,05	Triwulan 1					
						Triwulan 2	84,28	84,19	100,13		
						Triwulan 3					
						Triwulan 4	84,28	84,28	84.23		
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>84.23</b>	<b>84.23</b>		
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	B	Triwulan 1					
						Triwulan 2					
						Triwulan 3					
						Triwulan 4	B	B	80.00		

						<b>Kondisi Akhir (F)</b>	<b>80</b>	<b>80.00</b>	
--	--	--	--	--	--	------------------------------	-----------	--------------	--

Sumber data : dari Dokumen sumber kepuasan Masyarakat

**Keterangan**

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

---

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

2. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Cilawu tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sikip kecamatan.
4. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator SasaranNilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 84,19%.
5. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu Sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;  
Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2022 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Cilawu. Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.  
Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya.



---

### **2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Cilawu sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat ditingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan Tabel 2.5 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota**  
**Renja Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut**  
**Periode Pelaksanaan Tahun 2023 TW II**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan Tahun 2023 ( TW 2 )								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Daerah kabupaten yang dievaluasi (Tahun 2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	3		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100%	6.396.790.587	100%	2,756,762,633.00	100%	2,184,982,153.00	838,309,964	1,073,225,803	-						1,911,535,767	4,668,298,400	93,365,968,000					

<b>Perencanaan anggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>15.449.280</b>	<b>100%</b>	<b>7,606,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>10,879,400.00</b>	<b>9,533,800</b>	<b>9,533,800</b>	<b>-</b>	<b>19,067,600</b>	<b>26,673,600</b>	<b>533,472,000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	9.864.888	1 Dok	4,242,000.00	1 dokumen	3,278,000.00	3,278,000	3,278,000	-	6,556,000	10,798,000	<b>215,960,000</b>	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1,149,200.00	1,149,200	1,149,200	-	<b>2,298,400</b>	2,298,400	<b>45,968,000</b>	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen				1 Dokumen	1,004,600.00	1,004,600	1,004,600	-	<b>2,009,200</b>	2,009,200	<b>40,184,000</b>	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen				1 Dokumen	1,282,000.00	1,282,000	1,282,000	-	2,564,000	2,564,000	<b>51,280,000</b>	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen			-	1 Dokumen	1,345,500.00	-		-									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			-	1 laporan	1,140,000.00	1,140,000		1,140,000				2,280,000		2,280,000			<b>45,600,000</b>
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	10 Dok	3,364,000.00	1 Laporan	1,680,000.00	1,680,000		1,680,000				3,360,000		6,724,000			<b>134,480,000</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>2.591.353.879</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1,777,639,579.00</b>	<b>100</b>	<b>1,869,903,343.00</b>	<b>669,726,722</b>		<b>9,931,974,206</b>	<b>-</b>			<b>10,601,700,928</b>		<b>12,379,340,507</b>			<b>247,586,810,140</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	2.585.139.961	1 tahun	1,774,932,079.00	1 tahun	1,865,855,943.00	699,726,722		931,974,206				1,631,700,928		3,406,633,007			<b>68,132,660,140</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	6.213.918.	1 laporan	2,707,500.00	1 laporan	4,047,400.00		<b>0</b>	-						2,707,500			<b>54,150,000</b>

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>51.900.000</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>41,380,000.00</b>	5,464,000	<b>5,464,000</b>	-				10,928,000	<b>10,928,000</b>	<b>218,560,000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 stel	34.650.000	105 stel	-	50 stel	21,222,000.00	5,464,000	5,464,000	-				10,928,000	10,928,000	<b>218,560,000</b>
	pengadaan Pakaian Olah Raga				-		5,158,000.00	-	-	-				-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		17.250.000		-	9 Orang	15,000,000.00	-	-	-				-	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>241.336.486</b>	<b>100%</b>	<b>66,337,763.00</b>	<b>100%</b>	<b>138,688,050.00</b>	<b>55,174,350</b>	<b>60,910,250</b>	-				<b>116,084,600</b>	<b>182,422,363</b>	<b>3,648,447,260</b>

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 item	19.012.669	12 Bulan	-	11 Paket	4,807,400.00	4,807,400	4,807,400	-	9,614,800	9,614,800	<b>192,296,000</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 item	83.995.389	160 Jenis	32,000,300.00	32 Paket	33,420,200.00	15,211,800	18,385,200	-	33,597,000	65,597,300	<b>1,311,946,000</b>
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	24.446.888	80 Item	3,562,575.00	16 Paket	53,957,250.00	8,400,350	8,400,350	-	16,800,700	20,363,275	<b>407,265,500</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 item	27.981.347	35 item	3,985,450.00	7 Paket	11,641,800.00	6,611,300	7,144,100	-	13,755,400	17,740,850	<b>354,817,000</b>
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	99 exemplar	47.577.393	360 exemplar	6,150,000.00	72 exemplar	11,649,400.00	4,741,000	5,689,200	-	10,430,200	16,580,200	<b>331,604,000</b>
Fasilitasi Kunjungan Tamu	780 orang	38.322.800	6820 orang	10,560,000.00	1364 orang	12,978,000.00	5,407,500	6,489,000	-	11,896,500	22,456,500	<b>449,130,000</b>

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252 kali		2680 orang	10,080,000.00	-	-	-	-	-	-	10,080,000	201,600,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen			-	1 dokumen	10,234,000.00	9,995,000	9,995,000	-	19,990,000	19,990,000	399,800,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1 laporan</b>	<b>3.352.115.726</b>	<b>1 laporan</b>	<b>822,795,300.00</b>	<b>1 laporan</b>	<b>88,955,200.00</b>	<b>46,838,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46,838,300</b>	<b>869,633,600</b>	<b>170,516</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	97.680.000	-	0	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		146.520.000	3 Unit	23,834,000.00		-	-	-	-	-	23,834,000	476,680,000
	Pengadaan Mebel		523.097.210	5 Paket	52,185,000.00	1 Paket	-	-	-	-	-	52,185,000	1,043,700,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	28.880.582	1 Paket		2 Unit			-	-	-	-	

	Pengadaan Sarana dan Perasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	2.555.937900	1 Unit	746,776,300.00	1 Unit	-	-	-	-	-	-	746,776,300	14,935,526,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>61.544.850</b>	<b>100%</b>	<b>35,419,991.00</b>	<b>100%</b>	<b>40,334,160.00</b>	<b>21,572,792</b>	<b>23,064,047</b>	<b>-</b>	<b>44,636,839</b>	<b>80,056,830</b>	<b>1,601,136,600</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 kali	25,867,322	36 kali	11,791,024.00	12 Bulan	16,666,560.00	6,892,192	7,238,447	-	14,130,639	25,921,663	518,433,260	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28 orang/bulan	35,677,528	28 orang/bulan	19,368,967.00	12 Bulan	23,667,600.00	14,680,600	15,825,600	-	30,506,200	49,875,167	997,503,340	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3 item	4,260,000.00	0	-	-	-	-	-	4,260,000	85,200,000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>83,090,366</b>	<b>100%</b>	<b>49,669,500.00</b>	<b>100%</b>	<b>88,955,200.00</b>	<b>46,838,300</b>	<b>51,813,300</b>	<b>-</b>	<b>98,651,600</b>	<b>148,321,100</b>	<b>2,966,422,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	14 unit	51,890,366	1 unit	2,402,600.00	1 unit	27,052,000.00	14,535,100	15,910,100	-	30,445,200	32,847,800	656,956,000	



	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	31,200,000	8 unit	47,266,900.00	8 unit	61,903,200.00	32,303,200	35,903,200	-			68,206,400	115,473,300	<b>2,309,466,000</b>			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung		1 unit	-	1 unit	-		-	-			-	-	-			
	<b>Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>559,305,014</b>	<b>100%</b>	<b>243,757,500.00</b>	<b>100%</b>	<b>316,920,300.00</b>	<b>83,155,200</b>	<b>91,815,200</b>	<b>-</b>			<b>174,970,400</b>	<b>418,727,900</b>	<b>8,374,558,000</b>			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	308,880,000	1 laporan	80,953,000.00	1 laporan	130,920,300.00	25,905,200	26,465,200	-			52,370,400	133,323,400	<b>2,666,468,000</b>			

Kordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intasi Vertikal terkait	1 Laporan	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 kegiatan	193,680,000	18 Desa	80,953,000.00	18 Desa	130920300	25,905,200	26,465,200	-	-	-	52,370,400	133,323,400	2,666,468,000			
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>250,425,014</b>	<b>100%</b>	<b>156,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>186,000,000.00</b>	<b>57,250,000</b>	<b>65,250,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122,500,000</b>	<b>278,500,000</b>	<b>5,570,000,000</b>			
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada masyarakat di Kecamatan	3 laporan	46,425,014.00	3 laporan	-	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 jenis	204,000,000	13 jenis, 12 bulan, 12 bulan	156,000,000.00	12 Bulan	186,000,000.00	57,250,000	65,250,000	-			122,500,000	278,500,000	5,570,000,000
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>63,814,925</b>	<b>100%</b>	<b>26,142,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>49,814,600.00</b>	<b>23,213,500</b>	<b>27,332,700</b>	<b>-</b>			<b>50,546,200</b>	<b>76,688,200</b>	<b>1,533,764,000</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>1 laporan</b>	<b>46,564,925</b>	<b>1 laporan</b>	<b>11,142,000.00</b>	<b>1 laporan</b>	<b>18,254,400.00</b>	<b>9,894,400</b>	<b>11,554,400</b>	<b>-</b>			<b>21,448,800</b>	<b>32,590,800</b>	<b>651,816,000</b>
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	18 Desa	33,000,000		11,142,000.00		3,254,400.00	3,254,400	3,254,400	-			6,508,800	17,650,800	353,016,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 desa	13,564,925.00	24 desa	-	24 desa	15,000,000.00	6,640,000	8,300,000	-			14,940,000	14,940,000	298,800,000

<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	1 laporan	17,250,000	-	15,000,000.00	1 laporan	15,000,000.00		7,500,100	7,500,100	-			15,000,200	30,000,200	<b>600,004,000</b>
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					1 laporan	-		-	-	-			-	-	-
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 laporan	17,250,000	-	15,000,000.00	1 laporan	15,000,000.00	50%	7,500,000	7,500,100	-			15,000,100	30,000,100	<b>600,002,000</b>
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>		0.00		-	1 Laporan	<b>16,560,000.00</b>		<b>66,679,100</b>	<b>8,278,200</b>	-			<b>74,957,300</b>	74,957,300	<b>1,499,146,000</b>
Pencegahan Covid 19 di Tingkat Desa					1 Laporan	-		-	-	-			-	-	-
Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa					1 Laporan	16,560,000.00		6,679,100	8,278,200	-			<b>14,957,300</b>	14,957,300	<b>299,146,000</b>
Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0.00		-	1 Laporan	-		-	-	-			-	-	-

<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>205,720,800</b>	<b>100 %</b>	<b>64,767,300.00</b>	<b>100 %</b>	<b>119,719,100.00</b>		40,350,700		<b>77,544,700</b>	-			<b>117,895,400</b>		182,662,700		<b>3,653,254,000</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1 laporan</b>	<b>132,721,500</b>	<b>1 laporan</b>	<b>64,767,300.00</b>	<b>1 laporan</b>	<b>119,719,100.00</b>		40,350,700		<b>77,544,700</b>	-			117,895,400		182,662,700		<b>3,653,254,000</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 kali/bulan	132,721,500	12 kali	64,767,300.00	12 kali	70,769,100.00		30,654,700		36,294,700	-			66,949,400		131,716,700		<b>2,634,334,000</b>
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 cabang	72,999,300			1 Laporan	48,950,000.00		9,696,000		41,250,000	-			50,946,000		50,946,000		<b>1,018,920,000</b>
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah</b>	<b>1 laporan</b>	<b>72,999,300</b>	<b>1 laporan</b>	<b>-</b>	<b>1 laporan</b>	<b>-</b>		-		-	-			-		-		<b>-</b>

Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 kali/t ahun	-	2 kali/ tahu n	-	2 kali/t ahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>360,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>200,000,000.0 0</b>	<b>100 %</b>	<b>200,000,000.0 0</b>	<b>82,185,000</b>	<b>97,835,000</b>	<b>-</b>	<b>180,020,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>4,000,000,000</b>					
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1 lapor an</b>	<b>360,000,000</b>	<b>12 kali</b>	<b>200,000,000.0 0</b>	<b>12 kali</b>	<b>200,000,000.0 0</b>	<b>82,185,000</b>	<b>97,835,000</b>	<b>-</b>	<b>180,020,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>4,000,000,000</b>					

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 kegiatan	156,000,000.00	2 kegiatan	-	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 kali	204,000,000	12 kegiatan	<b>200,000,000.00</b>	12 kegiatan	200,000,000.00	82,185,000	97,835,000	-	-	-	180,020,000	200,000,000	<b>4,000,000,000</b>			

<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>100%</b>	<b>55,102,529</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>15,229,100.00</b>	<b>13,298,600</b>	<b>13,578,600</b>	<b>-</b>			<b>26,877,200</b>	<b>26,877,200</b>	<b>537,544,000</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>1 laporan</b>	<b>55,102,529</b>	<b>1 laporan</b>	<b>-</b>	<b>1 laporan</b>	<b>15,229,100.00</b>	<b>13,298,600</b>	<b>13,578,600</b>	<b>-</b>			<b>26,877,200</b>	<b>26,877,200</b>	<b>537,544,000</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Desa	8,400,000	3 kegiatan	-	1 Laporan	7,255,000.00	5,324,500	5,604,500	-			10,929,000	10,929,000	218,580,000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 kegiatan	12,814,925	1 kegiatan	-	1 Laporan	-	-	-	-			-	-	-	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	9,600,000	1 dokumen	-	1 Laporan	-	-	-	-			-	-	-	



Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	-	1 dokumen	7,974,100.00	7,974,100	7,974,100	-	15,948,200	15,948,200	318,964,000	
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7,640,733,855	3,294,135,495.00	2,886,665,053.00	0.14	1,080,512,964	1,390,765,803	-	2,471,278,767	5,765,414,262	115,308,285,240

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Faktor pendorong pencapaian kinerja :

Faktor penghambat :

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan, 2023

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut**

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2022		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81,5	8.2	82,5	83	82,75	84.19	84,19	84.20	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			65	70	75	80	80	80	80	82	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			81	82	84	85	81	81	82	82	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			cc	B	B	B	B	B	B	B	

*Sumber : Pengolahan Data Kecamatan/SKPD, 2023*

---

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam suatu perencanaan karena dampaknya yang signifikan di masa datang, dari gambaran umum permasalahan yang timbul di Kecamatan Cilawu, maka permasalahan pokok pada pembangunan adalah;

- (1) Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial;
- (2) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia;
- (3) Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur;
- (4) Belum optimalnya kinerja pelayanan publik kepada masyarakat,
- (5) Belum Optimalnya tingkat penanganan Kesehatan.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan public
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya penanggulangan AKI/AKB.
9. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
10. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

---

Dalam rangka menyikapi isu-isu Permasalahan di Kecamatan Cilawu, ditentukan langkah-langkah penting sebagai berikut :

**1. Pemanfaatan**

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan;

**2. Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata di segala bidang;

**3. Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada

---

pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

#### **4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat. dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab

#### **5. Inovasi dan Kolaborasi**

Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan berkelanjutan, dilakukan antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku untuk memanfaatkan potensi dan peluang dalam menjawab permasalahan dan tantangan.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM;
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam

- 
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;
  7. Permasalahan pokok yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah, Sumber Daya Manusia yang terbatas, Sarana dan Prasarana yang belum memadai, angka kemiskinan yang relative tinggi, dan tata kelola pemerintahan lintas sektor yang belum optimal.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.;
2. Minimnya sarana prasarana penunjang kegiatan;
3. Belum optimalnya implementasi SOP;
4. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada kurang update;
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
6. Keterbatasan lapangan pekerjaan;
7. Minimnya sinkronisasi data dalam implementasi program dan kegiatan;
8. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting;
10. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cilawu serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86

---

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan/SKPD berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Cilawu.

Untuk melaksanakan Program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Cilawu sebesar Rp. 4,666,068,725.00

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Cilawu diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.5 berikut:

Tabel 2.7

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Cilawu

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						
<b>7 01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>4,666,068,725</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>4,666,068,725</b>		
<b>7 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>3,428,305,577</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOT</b>	Kecamatan Cilawu KabGarut	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>3,428,305,577</b>		
<b>7 01 01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	2,01	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>14,156,600</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Cilawu KabGarut	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>14,156,600</b>		
7 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,0101	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	2.161.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	2.161.800	



7	1	1	0 2. 0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,999,200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,999,200	
7	1	1	0 2. 0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	
7	1	1	0 2. 0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,999,800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,999,800	
7	1	1	0 2. 0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	
7	1	1	0 2. 0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2 Laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2 Laporan	2,000,000	

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,998,800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,998,800	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>2,354,194,692</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>2,354,194,692</b>	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cilawu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,350,108,692	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cilawu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,350,108,692	
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4,086,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4,086,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>48,256,800</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>48,256,800</b>	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cilawu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	31,756,800	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cilawu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	31,756,800	

7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Cilawu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	16,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Cilawu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	16,500,000
7	01	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>169,092,100</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>298.518.556</b>
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	11 Paket	13,587,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	11 Paket	13,587,000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	32 Paket	33,384,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	32 Paket	33,384,200
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	16 Paket	22,083,600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	16 Paket	22,083,600
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	25,495,400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	25,495,400

7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72 Dokumen	43,251,900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72 Dokumen	43,251,900
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1364 orang	31,290,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1364 orang	31,290,000
7	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>726,133,500</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>726,133,500</b>
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	89,480,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	89,480,000
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cilawu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	60,487,600	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cilawu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	60,487,600
7	01	01	2,07	03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cilawu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	26,166,200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cilawu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	26,166,200
7	011	01	02.07	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kecamatan Cilawu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1 Paket	549,999,700	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cilawu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1 Paket	549,999,700

					atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Disediakan				Lainnya yang Disediakan				
7	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>56.415.535</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>58.405.886</b>	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	23,711,385	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	23,711,385	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	32,704,150	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	32,704,150	
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>60,053,350</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>60,053,350</b>	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	31,459,650	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	31,459,650	

7	01	01	2,090	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	28,593,700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	28,593,700
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	<b>512,692,390</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kecamatan Cilawu	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	<b>512,692,390</b>
7	01	02	2,01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	<b>283,130,300</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	<b>283,130,300</b>
7	01	02	2,010	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Dokumen	105,590,400	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Dokumen	105,590,400

7	01	02	2,02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18 Dokumen	177,539,900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18 Dokumen	177,539,900
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan olen unit Kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan olen unit Kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	1 Laporan	229,562,090	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan olen unit Kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan olen unit Kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	1 Laporan	229,562,090
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 laporan	42,562,600	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 laporan	42,562,600
7	01	02	2,02	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	186,999,490	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	186,999,490
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	86,301,000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Cilawu	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	86,301,000

7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	<b>24,967,300</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	<b>24,967,300</b>	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cilawu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Laporan	9,996,800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cilawu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Laporan	9,996,800	
7	01	03	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	14,970,500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	14,970,500	
7	01	03	2,01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Cilawu</b>	<b>Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>26,499,800</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Cilawu</b>	<b>Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>26,499,800</b>	
7	01	03	2,01	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	<b>Kecamatan Cilawu</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	10,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	<b>Kecamatan Cilawu</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	10,000,000	
7	01	03	2,01	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<b>Kecamatan Cilawu</b>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Laporan	16,499,800	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<b>Kecamatan Cilawu</b>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	1 Laporan	16,499,800	





7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	<b>188,577,000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	<b>188,577,000</b>	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	1 Kegiatan	121,661,200	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	1 Kegiatan	121,661,200	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cilawu	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	66,915,800	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cilawu	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	66,915,800	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>329,999,558</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>329,999,558</b>	
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	1 Kegiatan	<b>329,999,558</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	1 Kegiatan	<b>329,999,558</b>	

							Penugasan Kepala Daerah					Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Cilawu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Laporan	142,999,558	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Cilawu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Laporan	142,999,558	
7	01	05	2,01	02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Laporan	187,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Laporan	187,000,000	

7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>120,193,200</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Cilawu	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>120,193,200</b>	
7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	<b>120,193,200</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Cilawu	Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	<b>120,193,200</b>	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Laporan	8,456,900	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Laporan	8,456,900	
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	50,173,600	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	50,173,600	
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Laporan	39,471,500	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Laporan	39,471,500	

7	01	06	2,01	1 6	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamat anCilaw u	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 laporan	39,471,500	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamat anCilaw u	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 lapor an	39,471,500	
<b>TOTAL</b>									<b>4,666,068,725</b>					<b>4,666,068,725</b>	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cilawu, 2023

**Tabel 2.8**  
**Ranwal Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cilawu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cilawu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/  Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target						
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7	1				<b>KECAMATAN</b>							<b>6,381,157,863</b>				<b>7,003,423,641</b>		
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							<b>5,212,870,165</b>				<b>5,736,457,177</b>		
7	1	1	2 0 1		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							<b>14,161,840</b>				<b>15,578,024</b>		
7	1	1	2 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase pelayanan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah pelayanan administrasi	Kab. Garut,	100 p ersen	2 Doku men	10 0 p	2,161,840			Persentase pelaya	100 persen	2,378,024

			01	Perangkat Daerah	an administrasi perkantoran	aan Perangkat Daerah	asi perkantoran	Cilawu, Cilawu			ersen				nan administrasi perkantoran	
7	1	1	201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2,200,000
7	1	1	201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2,200,000

7	1	1	2014	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2,200,000
7	1	1	2015	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2,200,000
7	1	1	2016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Persentase pelayanan administrasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	2 Laporan	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi	100 persen	2,200,000



					Realisasi Kinerja SKPD	perkantoran	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								perkantoran		
7	1	1	2017		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2,200,000
7	1	1	2022		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>2,354,213,408</b>				<b>2,589,634,748</b>	
7	1	1	2021		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pemenuhan administrasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	12 Bulan	100 persen	2,350,127,238	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi	100 persen	2,585,139,961

						keuangan perangkat daerah	Tunjangan ASN	perangkat daerah							keuangan perangkat daerah		
7	1	1	2 0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Laporan	10 0 persen	4,086,170	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 presen	4,494,787
7	1	1	2 0 5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							48,262,500					53,088,750
7	1	1	2 0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pemenuhan adimintrasi kepegawaian	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen tase	50 Paket	10 0 persen	31,762,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100 presentase	34,938,750

						perangkat daerah		perangkat daerah							perangkat daerah		
7	1	1	205		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	9 Orang	100 persen	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persentase	18,150,000
7	1	1	206		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>169,151,230</b>				<b>186,366,350</b>	
7	1	1	206		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	11 Paket	100 persen	13,587,782	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	14,946,560
7	1	1	206		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase pemenuhan	Jumlah Paket Peralatan dan	Jumlah pemenuhan administrasi	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	32 Paket	100 persen	33,387,376	Dana Transfer Umum-Dana	Presentase pemenuhan	100 persen	36,726,113

						administ rasi umum perangk at daerah	Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	asi keuangan perangkat daerah					Alokasi Umum		admini strasi umum perang kat daerah		
7	1	1	2 0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Present ase pemenu han administ rasi umum perangk at daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n	Jumlah pemenuh an administ rasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 p ersen	16 Pake t	10 0 p ersen	22,096,477	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Presen tase pemen uhan admini strasi umum perang kat daerah	100 pers en	24,506,124
7	1	1	2 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Present ase pemenu han administ rasi umum perangk at daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	Jumlah pemenuh an administ rasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 p ersen	7 Paket	10 0 p ersen	25,495,679	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Presen tase pemen uhan admini strasi umum perang kat daerah	100 pers en	28,145,246
7	1	1	2 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Present ase pemenu han administ rasi umum perangk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-	Jumlah pemenuh an administ rasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 p ersen	72 Doku men	10 0 p ersen	43,252,176	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Presen tase pemen uhan admini strasi umum perang	100 pers en	47,577,393

						at daerah	Undangan yang Disediakan								kat daerah		
7	1	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1364 Orang	100 persen	31,331,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	34,464,914
7	1	1	207		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>2,510,605,075</b>				<b>2,761,665,582</b>	
7	1	1	207	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	2 Unit	100 persen	89,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	98,494,000

7	1	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	2 Unit	100 persen	134,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	147,741,000
7	1	1	207	5	Pengadaan Mebel	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Paket	100 persen	60,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	66,550,000

7	1	1	2 0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	2 Unit	100 persen	26,255,075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	28,880,582
7	1	1	2 0 7	1 0 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Unit	100 persen	1,650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1,815,000,000

7	1	1	2 0 1 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Paket	100 persen	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	605,000,000
7	1	1	2 0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>56,416,112</b>		<b>64,057,723</b>		
7	1	1	2 0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	12 Bulan	100 persen	23,711,712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	28,082,883



7	1	1	2 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	12 Bulan	100 persen	32,704,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	35,974,840
7	1	1	2 0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>60,060,000</b>			<b>66,066,000</b>		
7	1	1	2 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	8 Unit	100 persen	31,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	34,606,000

7	1	1	2	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	8 Unit	100 persen	28,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	31,460,000
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							512,702,632			563,972,895		
7	1	2	2	01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>							283,140,000			311,454,000		
7	1	2	2	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelesaian kegiatan pemerintahan di tingkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	18 Dokumen	1 laporan	105,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan	1 laporan	116,160,000



7	1	2	2	0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				229,562,632		252,518,895							
7	1	2	2	0	2	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah laporan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	5 Dokumen	1 laporan	42,562,632	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1 laporan	46,818,895

7	1	2	0	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase jumlah laporan penyelesaian urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan penyelesaian urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	10 Orang	1 laporan	187,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah laporan penyelesaian urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1 laporan	205,700,000
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				86,497,014							76,996,715	
7	1	3	0	2	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								25,000,000				27,500,000

7	1	3	2 0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Kegiatan	1 laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	11,000,000
7	1	3	2 0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Kegiatan	1 laporan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16,500,000
7	1	3	2 0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							26,500,000			11,000,000		

7	1	3	2 0 3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan		1 laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 laporan	11,000,000	
7	1	3	2 0 3	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	2 Kegiatan	1 laporan	16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 laporan	0
7	1	3	2	.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						34,997,014			38,496,715			

			05																
7	1	3	05	2	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cilawu	100%	1 Dokumen	1 laporan	14,997,014	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	16,496,715
7	1	3	05	2	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cilawu	100%	1 Dokumen	1 laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	11,000,000
7	1	3	05	2	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan	Kab. Garut, Cilawu	100%	1 Dokumen	1 laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	11,000,000





7	1	4	2 0 1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	66,916,025	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	73,607,627
7	1	5		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>								330,000,000			363,000,000	
7	1	5	2 0 1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>								330,000,000			363,000,000	
7	1	5	2 0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Persentase jumlah laporan penyelesaian urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memanta	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai penugasan kepala daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	143,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah laporan penyelesaian urusan pemerintahan umum sesuai penugasan	1 laporan	157,300,000

					Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		pk Pengamal an Pancasila, Pelaksana an Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestaria n Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertah anan dan Pemelihar aan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									kepala daerah		
7	1	5	2 0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase jumlah laporan penyelesaian	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	Jumlah laporan penyelesaian urusan pemerintah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 Dokumen	1 laporan	187,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah laporan penyelesaian	1 laporan	205,700,000	





7	1	6	2	1	2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 Dokumen	1 laporan	11,747,014	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 laporan	12,921,715
7	1	6	2	1	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengaw	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	2 Kegiatan	1 laporan	8,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan	1 laporan	9,680,000



---

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023 dilakukan dengan mendasarkan pada adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Cilawu Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2022, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Cilawu tahun 2019-2024
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut
4. Meningkatkan keterssediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efesien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah

Tujuan dan sasaran Pembangunan Tahun 2023, merupakan rumusan kondisi yang akan dicapai atas capaian kinerja pembangunan pada pelaksanaan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Renstra Kecamatan Cilawu yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi Pembangunan Daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera" Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.



- 
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
  3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
  - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
  - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
  - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
  - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
  - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;

- c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
  - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
  - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
    - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
  5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
    - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
    - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik , Pemerataan Pembangunan Dan Daya Saing Daerah Serta Penguatan Demokrasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

1. Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
2. Peningkatan dukungan kehidupan beragama, budaya gotong royong, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kb, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilawu senantiasa memperhatikan Lima Arahan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima arahan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2023, diarahkan pada:

1. Penurunan Angka Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja;
2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban Serta Politik Dan Demokrasi;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesenjangan Gender Dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda Dan Olah Raga;
4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata;
5. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata Dan Jasa Produktif Lainnya;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengurangan Risiko Bencana;
7. Peningkatan Pelayanan Publik Dan Kinerja Aparatur;
8. Peningkatan Investasi Dan Pendapatan Daerah

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana. Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan guna peningkatan daya saing daerah;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah agar perekonomian masyarakat bisa berkembang serta mewujudkan pemerataan pembangunan; serta
4. Membangun komitmen seluruh *stakeholder* baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis, dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Cilawu mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah'
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan.

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja**  
**Kecamatan Cibalong**  
**Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	84
2	Meningkatnya kualitas tata kelola tingkat Kecamatan	Prosentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggara pemerintahan di tingkat Kecamatan	Nilai Sinegritas Kinerja Kecamatan	75
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	84 %
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nialai SAKIP Kecamatan	B

**Sumber : Pengolahan Data Sub Bagian Umum Kec. Cilawu**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan **Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilawu 2023**

---

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu unsur kewilayahan kecamatan.
2. Jumlah program sebanyak 06 program, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan, dari total 46 Sub kegiatan
4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 46 kegiatan dari total 46 Sub kegiatan .

Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cilawu Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 3.012.507.052,-**, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. **2.901.416.247,-** mengalami penyesuaian sebesar Rp. **111.090.805,-** yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Perubahan Program dan Perangkat Daerah Kabupaten Garut

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cilawu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cilawu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN								3,012,507,052	2,901,416,243				5,071,104,641				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,268,560,352	2,199,711,643				3,791,216,177				
7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								17,929,400	10,879,400				15,578,024				
7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	3,878,000	3,278,000			Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2,378,024

7	1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,969,200	1,149,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2,200,000
7	1	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,974,600	1,004,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2,200,000
7	1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,582,000	1,282,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2,200,000



7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,905,600	1,345,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2,200,000
7	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	2 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	2,000,000	1,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2,200,000

7	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	4,620,000	1,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2,200,000
7	1	1	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>1,940,509,542</b>	<b>1,884,632,833</b>			<b>2,589,634,748</b>	
7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	1,936,462,142	1,880,585,433	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2,585,139,961
7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	4,047,400	4,047,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4,494,787
7	1	1	2.1		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>36,222,000</b>	<b>36,222,000</b>			<b>53,088,750</b>	

7	1	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 presentase	100 presentase	50 Paket	50 Paket	100 persen	100 persen	21,222,000	21,222,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 presentase	34,938,750
7	1	1	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 presentase	100 presentase	9 Orang	9 Orang	100 persen	100 persen	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 presentase	18,150,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>144,610,050</b>	<b>138,688,050</b>				<b>203,866,350</b>
7	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	11 Paket	11 Paket	100 persen	100 persen	4,807,400	4,807,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	14,946,560
7	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	32 Paket	32 Paket	100 persen	100 persen	33,420,200	33,420,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	36,726,113



7	1	1	2.1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	1364 Orang	1364 Orang	100 persen	100 persen	18,900,000	12,978,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	34,464,914
7	1	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	10,234,000	10,234,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	17,500,000
7	1	1	2.1		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>0</b>	<b>0</b>				<b>798,924,582</b>
7	1	1	2.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	98,494,000

7	1	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	66,550,000
7	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	28,880,582
7	1	1	2.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	605,000,000

7	1	1	2.1		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>40,334,160</b>	<b>40,334,160</b>					<b>64,057,723</b>	
7	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	16,666,560	16,666,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	28,082,883
7	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	23,667,600	23,667,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	35,974,840
7	1	1	2.1		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>88,955,200</b>	<b>88,955,200</b>					<b>66,066,000</b>	
7	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	9 Unit	9 Unit	100 persen	100 persen	27,052,000	27,052,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	34,606,000

7	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	100 persen	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	61,903,200	61,903,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	31,460,000
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>316,920,300</b>	<b>316,941,700</b>			<b>511,678,895</b>		
7	1	2	2		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>130,920,300</b>	<b>130,920,300</b>			<b>259,160,000</b>		
7	1	2	2	1	Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 laporan	116,160,000



							Prosentase Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi/Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 Persen	100 Persen									
7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	130,920,300	130,920,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 laporan	143,000,000
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan									1 Laporan	1 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			



							Prosentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100 Persen	100 Persen									
7	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 laporan	1 laporan	186,000,000	186,021,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1 laporan	205,700,000



7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 laporan	1 laporan	5,774,400	3,254,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	11,000,000
7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 laporan	1 laporan	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16,500,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>										<b>15,000,200</b>	<b>15,000,200</b>				<b>29,150,000</b>	
7	1	3	2	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 laporan	11,000,000

7	1	3	2	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 laporan	1 laporan	15,000,200	15,000,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 laporan	18,150,000
7	1	3	2.1		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>											<b>30,000,000</b>	<b>16,560,000</b>			<b>45,712,715</b>	
7	1	3	2.1	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16,496,715
7	1	3	2.1	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	30,000,000	16,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	18,216,000

7	1	3	2.1	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	11,000,000
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>										<b>126,251,600</b>	<b>119,719,100</b>			<b>207,435,139</b>		
7	1	4	2		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>										<b>126,251,600</b>	<b>119,719,100</b>			<b>207,435,139</b>		
7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	76,251,600	70,769,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	133,827,512
																	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

7	1	4	2	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000	48,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	73,607,627
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>200,000,100</b>	<b>200,000,100</b>				<b>363,000,000</b>	
7	1	5	2		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										<b>200,000,100</b>	<b>200,000,100</b>				<b>363,000,000</b>	
7	1	5	2	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Persentase jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 laporan	157,300,000



					Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah														
7	1	5	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Dokumen Tugas Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	200,000,100	200,000,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 laporan	205,700,000

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1 Laporan	1 Laporan								
					Prosentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						100 Persen	100 Persen								
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>										<b>35,000,100</b>	<b>15,229,100</b>		<b>95,411,715</b>		
7	1	6	2		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>										<b>35,000,100</b>	<b>15,229,100</b>		<b>95,411,715</b>		

7	1	6	2	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 laporan	24,490,000
7	1	6	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	15,000,000	7,255,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 laporan	16,500,000

7	1	6	2	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan	1 laporan	1 laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	1 laporan	1 laporan	20,000,100	7,974,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 laporan	25,000,000
7	1	6	2	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 laporan	12,921,715

7	1	6	2	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 laporan	16,500,000
<b>TOTAL</b>																<b>3,012,507,052</b>	<b>2,901,416,243</b>			<b>5,071,104,641</b>	

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

yang dikelola dalam SIPD.

**Tabel 3.3**

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023**

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													Formulir RKPA-BELANJA SKPD							
Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cilawu																				
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T - 1	Jumlah														Bertambah/ (Berkurang)	T+ 1
					T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)										
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				3,002,273,052	10,234,000	0	0	3,012,507,052	2,862,994,808	31,518,250	0	0	2,894,513,058	(117.993.994)	

7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>2,258,326,352</b>	<b>10,234, 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,268,560,352</b>	<b>2,169,600,608</b>	<b>31,518 ,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,201,118,858</b>	<b>(67.441. 494)</b>	
7	1	1	2. 0 1	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>17,929,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,929,400</b>	<b>10,879,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,879,400</b>	<b>(7.050.0 00)</b>	
7	1	1	2. 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Cilawu)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	3,878,000	0	0	0	3,878,000	3,278,000	0	0	0	3,278,000	-600	
7	1	1	2. 0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Cilawu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1,969,200	0	0	0	1,969,200	1,149,200	0	0	0	1,149,200	-820	
7	1	1	2. 0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kecamatan Cilawu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1,974,600	0	0	0	1,974,600	1,004,600	0	0	0	1,004,600	-970	

7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kecamatan Cilawu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		1,582,000	0	0	0	1,582,000	1,282,000	0	0	0	1,282,000	-300
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Kecamatan Cilawu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		1,905,600	0	0	0	1,905,600	1,345,600	0	0	0	1,345,600	-560
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Cilawu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,140,000	0	0	0	1,140,000	-860
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		4,620,000	0	0	0	4,620,000	1,680,000	0	0	0	1,680,000	(2.940.000)







7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Cilawu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		53,957,250	0	0	0	53,957,250	53,957,250	0	0	0	53,957,250	0
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Cilawu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		11,641,800	0	0	0	11,641,800	11,596,800	0	0	0	11,596,800	-45
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Cilawu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		11,649,400	0	0	0	11,649,400	11,649,400	0	0	0	11,649,400	0
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kecamatan Cilawu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		18,900,000	0	0	0	18,900,000	12,978,000	0	0	0	12,978,000	(5.922.000)
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana			0	10,234,000	0	0	10,234,000	0	10,234,000	0	0	10,234,000	0



7	1	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			88,955,200	0	0	0	88,955,200	88,955,200	0	0	0	88,955,200	0
7	1	1	2.091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Cilawu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,052,000	0	0	0	27,052,000	27,052,000	0	0	0	27,052,000	0
7	1	1	2.092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	61,903,200	0	0	0	61,903,200	61,903,200	0	0	0	61,903,200	0



7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Cilawu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		186,000,000	0	0	0	186,000,000	185,991,000	0	0	0	185,991,000	-9
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				65,774,600	0	0	0	65,774,600	41,534,600	0	0	0	41,534,600	(24.240.000)
7	1	3	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				20,774,400	0	0	0	20,774,400	18,254,400	0	0	0	18,254,400	(2.520.000)
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Cilawu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		5,774,400	0	0	0	5,774,400	3,254,400	0	0	0	3,254,400	(2.520.000)

7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Cilawu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
7	1	3	2.03	3	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>				15,000,200	0	0	0	15,000,200	15,000,200	0	0	0	15,000,200	0
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Cilawu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		15,000,200	0	0	0	15,000,200	15,000,200	0	0	0	15,000,200	0
7	1	3	2.05	5	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>				30,000,000	0	0	0	30,000,000	8,280,000	0	0	0	8,280,000	(21.720.000)
7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Cilawu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		30,000,000	0	0	0	30,000,000	8,280,000	0	0	0	8,280,000	(21.720.000)



7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			126,251,600	0	0	0	126,251,600	119,719,100	0	0	0	119,719,100	(6.532.500)
7	1	4	2. 0 1		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			126,251,600	0	0	0	126,251,600	119,719,100	0	0	0	119,719,100	(6.532.500)
7	1	4	2. 0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	76,251,600	0	0	0	76,251,600	70,769,100	0	0	0	70,769,100	(5.482.500)
					(Kecamatan Cilawu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
7	1	4	2. 0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	50,000,000	0	0	0	50,000,000	48,950,000	0	0	0	48,950,000	(1.050.000)



7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Cilawu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu		15,000,000	0	0	0	15,000,000	7,255,000	0	0	0	7,255,000	(7.745.000)
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan Cilawu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan		20,000,100	0	0	0	20,000,100	7,974,100	0	0	0	7,974,100	(12.026.000)

Sumber : Data SIPD Perubahan Program 2023 dan Pengolahan Data Kecamatan Cilawu, 2023

---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; vi) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN